



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
TAHUN 2021-2026**



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2021- 2026 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan renstra dilakukan dikarenakan terdapat perubahan Peraturan Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PPKD (Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994)
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PPKD (Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3)



11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4)
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 69)
13. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 82)

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah

Maksud penyusunan renstra perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika jangka pendek (5 tahun) dan Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi rencana strategis PD.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan renstra perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang berhubungan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2021-2026.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021-2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.



I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Berdasarkan Perwali tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 1 Sekretariat dan 3 Bidang, yakni:

1. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik, yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan



tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknologi dan informatika, yakni meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang layanan pemerintah berbasis elektronik (e-Gov), yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Surabaya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Tiap bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Sekretariat:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan, perundangundangan dan penanganan masalah hukum
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan
- g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- i. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
- j. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler
- k. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- l. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- m. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
- n. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian disekretariat
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- q. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian, dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub koordinator.



2. Tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik
- c. Pelaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait data dan informasi di lingkup kota
- f. Pelaksanaan pelayanan penetapan standar format data dan informasi
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral di lingkup kota
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan penyebarluasan data
- i. Pelaksanaan penyajian data hasil pengolahan
- j. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan data
- k. Pelaksanaan perencanaan komunikasi publik
- l. Pelaksanaan publikasi pemanfaatan layanan e-government dalam rangka mendukung smart city
- m. Pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal
- n. Pelaksanaan pembuatan konten lokal
- o. Pelaksanaan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintahan Daerah atau media internal
- p. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah
- q. Pelaksanaan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik
- r. Pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah
- s. Pelaksanaan pemantauan terhadap tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintahan daerah
- t. Pelaksanaan pemantauan pendapat umum (survei, jajak pendapat)



- u. Pelaksanaan pengelolaan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di daerah
- v. Pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- w. Pelaksanaan pelayanan dan mengolah pengaduan masyarakat
- x. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemerintah kota
- y. Pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (media relations)
- z. Pelaksanaan liputan
- aa. Pelaksanaan pengelolaan media pemerintah daerah
- bb. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan penyelenggaraan citra positif Pemerintah Daerah
- cc. Pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- dd. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik
- ee. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- ff. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

3. Tugas Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. pelaksanaan perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi



- berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- f. pelaksanaan perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - h. pelaksanaan rancangan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - i. pelaksanaan rancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - j. pelaksanaan perancangan SDM Sandi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - k. pelaksanaan monitoring trafik elektronik;
 - l. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
 - m. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di keamanan dan persandian;
 - n. pelaksanaan pengujian keamanan domain dan sub domain;
 - o. pelaksanaan pemantauan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
 - p. pelaksanaan audit TIK;
 - q. pelaksanaan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif, dan produktif;
 - r. pelaksanaan filtering konten negatif (jaringan Pemerintah Daerah);
 - s. pelaksanaan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
 - t. pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - u. pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;



- v. pelaksanaan penyelenggaraan program-program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- w. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- x. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- y. pelaksanaan pengamanan kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- z. pelaksanaan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- aa. pelaksanaan pencadangan, pemulihan data, informasi dan sistem jika terjadi gangguan operasional keamanan dan persandian;
- bb. pelaksanaan pelayanan Penyusunan instrumen dan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- cc. pelaksanaan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- dd. pelaksanaan pelayanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- ee. pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika;
- ff. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur TIK;
- gg. pelaksanaan pelayanan government cloud computing;
- hh. pelaksanaan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- ii. pelaksanaan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;
- jj. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang keamanan dan teknologi informasi;
- kk. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- ll. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

4. Tugas Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov):

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov);
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov);
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. pelaksanaan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-government* pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan pelayanan implementasi *e-government* dalam rangka mendukung *smart city*;
- h. pelaksanaan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-government* dalam rangka mendukung *smart city*;
- i. pelaksanaan pelayanan penyediaan sarana dan sarana
- j. pengendalian *e-government* dalam rangka mendukung *smart city*;
- k. pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik; pelaksanaan pelayanan interoperabilitas;
- l. pelaksanaan pelayanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
- m. pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- n. pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
- o. pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang TIK;



- p. pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dalam rangka mendukung *smart city*;
- q. pelaksanaan layanan sistem informasi *e-government* dalam rangka mendukung *smart city*;
- r. pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat;
- s. pelaksanaan penetapan tata kelola nama domain dan sub domain;
- t. pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Gov);
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.



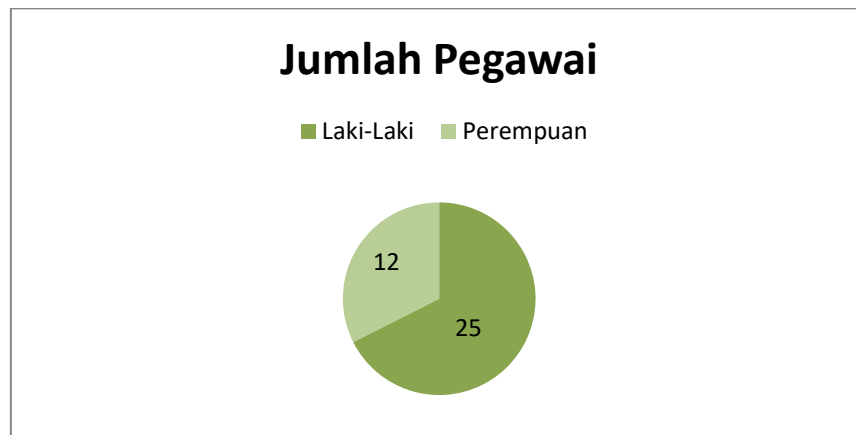
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jimerto No. 25 – 27 lantai V Kantor Pemerintah Kota Surabaya, telephone Telp. (031) 5475600; 5450082; 5460900; 5463770; 5463435; (031) 5312144 Pesawat 384; 275; 164; 292; 175 dan Fax. (031) 5450154.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2021 didukung oleh 37 (tiga puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil. Dari 37 (tiga puluh tujuh) jumlah PNS yang ada, terdapat 1 (satu) pegawai yang akan mengambil cuti di luar tanggungan negara selama 2 tahun sampai dengan Renstra ini disusun. Serta didukung oleh tenaga kontrak yang berjumlah 155 orang (data per Bulan Maret 2022).

Data jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berdasarkan Eselonisasi, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagaimana Gambar II.1, II.2, dan II.3 :

Gambar II.1
Grafik Perbandingan Jumlah PNS Jenis Kelamin

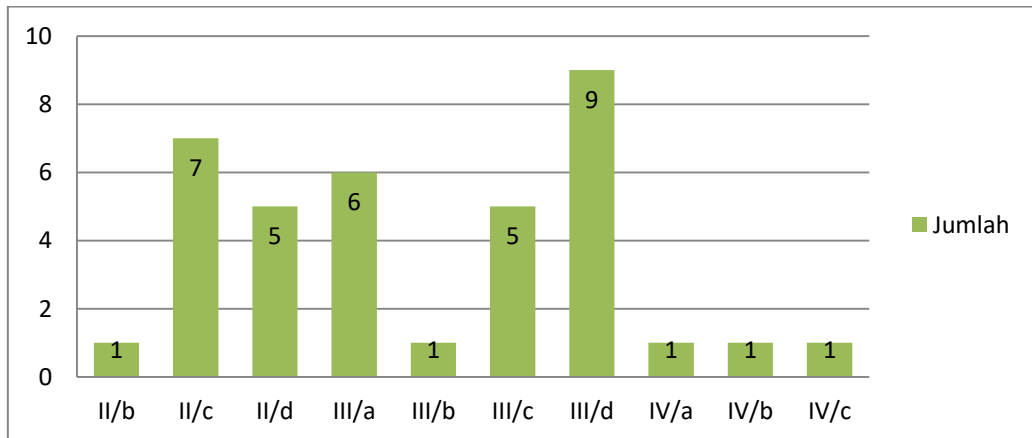


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui perbandingan jenis kelamin pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Jenis kelamin laki-laki (25) lebih dominan dibandingkan dengan jumlah jenis kelamin perempuan (12 orang).



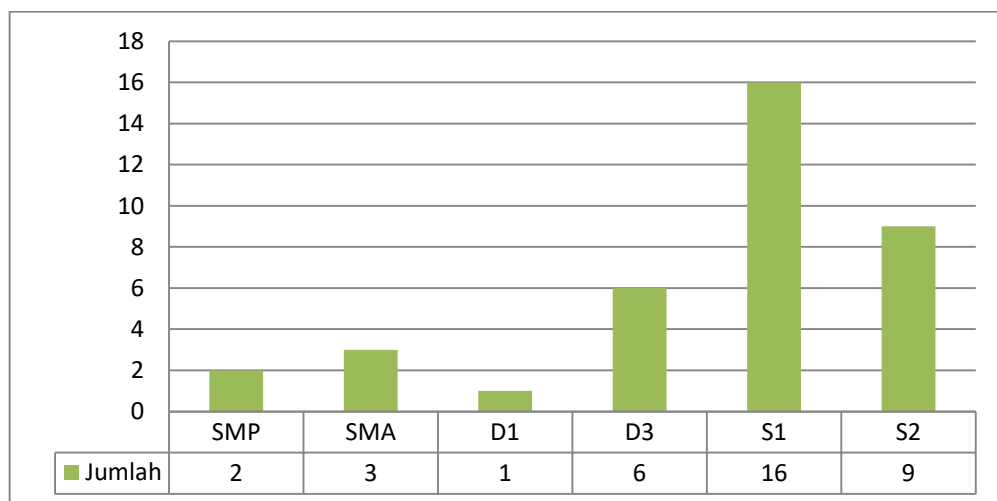
Gambar II.2
Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui golongan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Paling rendah yaitu golongan II/b sebanyak 1 orang, sedangkan golongan yang paling tinggi yaitu IV/c sebanyak 1 orang.

Gambar II.3
Jumlah Pegawai Dinkominfo berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah S1 dengan jumlah pegawai 16 orang. Sedangkan yang paling rendah adalah lulusan SMP sejumlah 2



orang dan jumlah lulusan paling tinggi adalah S2 sebanyak 9 orang.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki BLC (*Broadband Learning Ceter*). BLC merupakan Unit Belajar yang tersebar di seluruh daerah Surabaya. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki total 53 BLC. Namun, dikarenakan kondisi pandemi sejak awal tahun 2020 sampai saat ini yang masih belum reda, hanya 23 BLC yang beroperasi (data per Bulan Maret 2022). Berikut daftar 53 BLC yang ada di Surabaya antara lain:

Tabel II.2
BLC (*Broadband Learning Ceter*) Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama BLC	No	Nama BLC
1	Rusun Jambangan	28	Wonorejo Rungkut
2	Rusun Tanah Merah 2	29	Simomulyo
3	Rusun Tanah Merah	30	Klakah Rejo
4	Mojo	31	Simokerto
5	Kebun Bibit Wonorejo	32	Rusun Urip Sumoharjo
6	Rusun Pesapen	33	Medokan Ayu
7	Bulak	34	Kemayoran
8	Mulyorejo	35	Banyu Urip
9	Rumah Bahasa	36	Rusun Grudo
10	Rusun Sombo	37	Bulak Banteng
11	Rusun Penjaringansari III	38	Rusun Romokalisari
12	Ampel (Telecenter)	39	Taman Flora
13	Wiyung	40	Ujung
14	Kedurus	41	Rusun Penjaringansari I
15	Rusun Randu	42	Kelurahan Bendul Merisi
16	Petemon	43	Gayungan
17	Gubeng	44	Rusun Penjaringan Sari II
18	Sememi	45	Rusun Siwalankerto
19	Pakal	46	Taman Prestasi
20	Rusun Wonorejo	47	Dukuh Menanggal
21	Griyo Keputih	48	Kupang Gunung
22	Made	49	Dukuh Kupang
23	Gunung Anyar	50	Gelanggang Remaja
24	Sawunggaling	51	Rusun Bandarejo
25	Karang Pilang	52	Rusun Tambakwedi
26	Putat Jaya	53	Rusun Keputih
27	Rusun Dupak Bangunrejo		

Keterangan: Yang diberi warna adalah BLC yang beroperasi



II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan isu pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip *Good Government* sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

TIK yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya Teknologi Informasi dan Komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tertuang dalam Renstra 2016-2021, target SPM, IKK dan MDG's sbb:



**Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Surabaya**

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	N/A	✓	N/A	62%	64%	66%	N/A	N/A	78.08%	83%	83.27%	N/A	N/A	125.94%	129.69%	126.17%	N/A	N/A
		N/A	✓	N/A	90.84%	91.53%	91.96%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A	110.08%	109.25%	108.74%	N/A	N/A
		N/A	✓	N/A	76%	77%	78%	N/A	N/A	80.91%	85.34%	86.27%	N/A	N/A	106.46%	110.83%	110.60%	N/A	N/A
	Sasaran : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-14

			Program	Operational Plan																		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	100%	100.00 %	N/A	N/A	100.00 %	100%	100%	N/A	N/A
			Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
			Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	9 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	75.00 %	N/A	N/A	N/A
			Sasaran : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	97.87 %	99.89%	N/A	N/A	100.00 %	97.87 %	99.89 %	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-15

				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	72%	74%	76%	N/A	N/A	81.00 %	84.84 %	83.88%	N/A	N/A	112.50 %	114.65%	110.37%	N/A	N/A
				Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	9 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	9 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	138.48 %	N/A	N/A	N/A	N/A	138.48%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A
				Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	104.65%	N/A	N/A	N/A	100.00 %	104.65%	N/A	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-16

				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00 %	94.67 %	99.77%	N/A	N/A	100.00 %	94.67 %	99.77 %	N/A	N/A
			Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	N/A	N/A	N/A	130 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	130 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
			Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	149 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	152 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	102.01%	N/A	N/A	N/A
			Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A
			Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif	N/A	✓	N/A	75cukup	75cukup	75cukup	N/A	N/A	97.58cukup	97.59 cukup	98.07cukup	N/A	N/A	130.11 %	130.12%	130.76%	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-17

			Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik berbasis TIK	Presentase pemanfaatan layanan publik administratif berbasis TIK	N/A	N/A	N/A	39.55%	43.63%	47.7%	N/A	N/A	91.18%	100%	100.00%	N/A	N/A	230.54%	229.2%	209.64%	N/A	N/A
			Program Pengembang an dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	N/A	N/A	N/A	31.56%	35.11%	38.65%	N/A	N/A	31.56%	35.11%	39.01%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.92%	N/A	N/A
				Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100.00%	100%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	N/A	N/A
			Kegiatan : Layanan Sistem Informasi Pemerintah an	Jumlah dokumen laporan layanan pengaduan Sistem Informasi Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	12 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
			Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaa n Pemanfaata	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang	N/A	N/A	N/A	1 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-20

				Kegiatan : Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang dimonitor dan dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	185 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	185 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah integrasi sistem yang dibangun	N/A	N/A	N/A	N/A	3 database	N/A	N/A	N/A	N/A	3 database	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	N/A	N/A	N/A	N/A	119 aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	119 aplikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-21

				Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data	Jumlah lokasi pusat data dan koneksi internet yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	538 lokasi	N/A	N/A	N/A	N/A	538 lokasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah peralatan komunikasi persandian yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	608 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	615 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	101.15%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Analisa Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengaduan Layanan Sistem	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-24

				Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan publik terhadap saluran Komunikasi informasi	Tingkat Pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi dan media massa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	3	3.5	4	N/A	N/A	4.02	5.2	5.50	N/A	N/A	133.83 %	148.57 %	137.50 %	N/A	N/A
				Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	8765ku njungan	9116ku njungan	9481kunj ungan	N/A	N/A	34,820. 40 kunjung an	42303 .67ku njung an	33,284. 77kunj ngan	N/A	N/A	397.27 %	464.06 %	351.07 %	N/A	N/A
				Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Komunikas i Dan Informasi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	N/A	N/A	N/A	500 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	500 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Pengelolaa n Dan Pengumpul an Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	4 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-25

				Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Keluhan/Pe ngaduan masyarakat, Permintaan dan Dokumenta si Informasi Publik	Pelaksanaan Pelayanan Keluhan/Penga duan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	12 dokume n	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokume n	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Pengelolaa n Saluran Komunikas i	Jumlah Laporan Pengelolaan Saluran Komunikasi	N/A	N/A	N/A	12 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Pengemban gan Sumber Daya Komunikas i Dan Informasi	Jumlah Materi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	N/A	N/A	N/A	2 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokum en	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Publikasi Penyelengg araan Pembangun an Daerah	Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraa n Pembangunan Daerah	N/A	N/A	N/A	81 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	81 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah	Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00 %	N/A	N/A	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-26

				an dan Sistem Informasi Publik	dan Pembinaan TIK																		
				Kegiatan : Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	314 Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	314 Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik	Jumlah BLC yang melaksanakan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem informasi Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	44 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	44 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Jumlah dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	13 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	13 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan	N/A	N/A	N/A	N/A	16 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	16 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-29

			Pembangunan Daerah	n Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan																		
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah BLC yang melaksanakan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	49 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A
			Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	>70-80	>80-90	N/A	N/A	N/A	76.94	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
			Sasaran : Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87,00 %	88,00 %	N/A	N/A	N/A	89.54%	88.61%	N/A	N/A	N/A	102.92 %	100.69%



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-30

			Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.0 0%
			Program Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,0 0%	100,0 0%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100 %
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,0 0%	100,0 0%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100 %
			Kegiatan : Pemelihara an dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.0 0%
			Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraa n TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	76- 100 (Baik)	76- 100 (Baik)	N/A	N/A	N/A	97.33	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-31

			Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik berbasis TIK	Presentase Pemanfaatan Layanan Publik Administratif berbasis TIK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,77 %	55,85 %	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	193.16 %	N/A
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53,85 %	58,37 %	N/A	N/A	N/A	54.3%	58.37%	N/A	N/A	N/A	100.83 %	100 %
			Kegiatan : Layanan Sistem Informasi Pemerintah an dan Publik	Jumlah layanan sistem informasi pemerintah dan publik yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	396 lokasi	399 lokasi	N/A	N/A	N/A	396 lokasi	399 lokasi	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.0 0%
			Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72 lokasi	72 lokasi	N/A	N/A	N/A	72 lokasi	72 lokasi	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.0 0%
			Kegiatan : Pembangun an Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 aplika si	15 aplika si	N/A	N/A	N/A	15 aplikasi	15 aplikasi	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.0 0%



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-33

				Pengembangan Sarana Prasarana TIK	Pengembangan Sarana Prasarana TIK																		
				Kegiatan : Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	N/A	N/A	N/A	100 persen	100 persen	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.00 %
				Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Lokasi	2 Lokasi	N/A	N/A	N/A	2 Lokasi	2 Lokasi	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.00 %
				Sasaran : Meningkatkan Pemanfaatan publik terhadap saluran Komunikasi informasi	Tingkat Pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi dan media massa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.5	5	N/A	N/A	N/A	5.7	N/A	N/A	N/A	N/A	126.67 %	N/A
				Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32.000 Kunjungan	32.414 Kunjungan	N/A	N/A	N/A	65441.35kunjungan	227423.06kunjungan	N/A	N/A	N/A	204.5 %	701.62 %



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-34

				Kegiatan : Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat , Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3000 berkas	3000 berkas	N/A	N/A	N/A	4058 berkas	11343 berkas	N/A	N/A	N/A	135.27 %	162.04 %
				Kegiatan : Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19 Saluran	19 Saluran	N/A	N/A	N/A	19 Saluran	19 Saluran	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.00 %
				Kegiatan : Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11 kali	11 kali	N/A	N/A	N/A	6 kali	11 kali	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.00 %
				Kegiatan : Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Daerah yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.00 %
				Kegiatan : Publikasi	Jumlah Publikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Jenis	4 Jenis	N/A	N/A	N/A	3 Jenis	3 Jenis	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.00 %



**Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Surabaya**

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	105,610,329	205,662,141	0	N/A	N/A	101,307,345	152,745,286	0	N/A	N/A	95.93 %	74.27 %	0.00 %	N/A	N/A	-50.00%	-50.00%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,411,284,417	2,256,431,053	2,059,110,393	N/A	N/A	1,843,425,595	1,915,166,916	1,789,757,047	N/A	N/A	76.45 %	84.88 %	86.92 %	N/A	N/A	-7.30%	-1.46%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	666,768,761	1,543,503,002	2,022,565,916	N/A	N/A	581,586,217	879,393,346	1,595,276,360	N/A	N/A	87.22 %	56.97 %	78.87 %	N/A	N/A	101.67 %	87.15%
Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	11,474,621,251	13,673,548,074	13,779,334,764	N/A	N/A	9,560,592,602	11,709,706,344	12,077,225,031	N/A	N/A	83.32 %	85.64 %	87.65 %	N/A	N/A	10.04%	13.16%
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	47,202,220,596	60,589,643,759	81,331,665,666	N/A	N/A	44,753,643,791	53,386,809,451	75,317,360,496	N/A	N/A	94.81 %	88.11 %	92.61 %	N/A	N/A	36.15%	34.15%



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-37

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	N/A	N/A	N/A	29,301,566,488	N/A	N/A	N/A	N/A	26,978,422,659	N/A	N/A	N/A	N/A	92.07 %	N/A	-	-
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	N/A	N/A	18,328,241,804	N/A	N/A	N/A	N/A	16,685,368,391	N/A	N/A	N/A	N/A	91.04 %	N/A	-	-
Program Pengelolaan Data Statistik Daerah	N/A	N/A	N/A	132,287,307	N/A	N/A	N/A	N/A	121,119,432	N/A	N/A	N/A	N/A	91.56 %	N/A	-	-
Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	N/A	N/A	N/A	4,578,787,160	N/A	N/A	N/A	N/A	3,806,738,938	N/A	N/A	N/A	N/A	83.14 %	N/A	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	1,880,354,234	N/A	N/A	N/A	N/A	1,735,363,165	N/A	N/A	N/A	N/A	92.29 %	N/A	-	-
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	N/A	N/A	N/A	662,491,950	N/A	N/A	N/A	N/A	551,864,822	N/A	N/A	N/A	N/A	83.30 %	N/A	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	13,548,725,259	N/A	N/A	N/A	N/A	12,605,384,392	N/A	N/A	N/A	N/A	93.04 %	-	-



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

II-38

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	10,652,840	N/A	N/A	N/A	N/A	10,471,400	N/A	N/A	N/A	N/A	98.30 %	-	-
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	N/A	N/A	N/A	N/A	5,018,231,885	N/A	N/A	N/A	N/A	4,303,343,796	N/A	N/A	N/A	N/A	85.75 %	-	-
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	N/A	N/A	N/A	N/A	38,737,806,009	N/A	N/A	N/A	N/A	34,039,682,425	N/A	N/A	N/A	N/A	87.87 %	-	-
Program Perekonomian Dan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	681,733,894	N/A	N/A	N/A	N/A	607,029,822	N/A	N/A	N/A	N/A	89.04 %	-	-
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	N/A	N/A	N/A	131,630,094	N/A	N/A	N/A	N/A	128,830,101	N/A	N/A	N/A	N/A	97.87 %	-	-



II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Semenjak ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, banyak tantangan dan peluang baru yang muncul bagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Salah satu tantangan terbesar adalah menjalankan indikator kinerja dan evaluasi dari pelaksanaan SPBE. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, terdapat banyak indikator yang harus dipenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk lima tahun ke depan.

- Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika:
 1. Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan *e-government*
 2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi
 3. Jaminan keamanan sistem TIK
 4. Kesenjangan kemampuan TIK masyarakat
 5. Pemetaan aspek dan indikator dalam arsitektur SPBE yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika
 6. Pelaksanaan dan pemenuhan aspek dan indikator SPBE yang diwujudkan dalam program dan kegiatan
- Peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika:
 1. Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK
 2. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK informatika (telematika)
 3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK
 4. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM



5. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
6. Penyelenggaraan statistik sektoral
7. Penerapan fungsi GPR (*Government Public Relations*)
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, juga perlu dilakukan sejumlah analisis/telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

II.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga(K/L) dan Renstra Perangkat Daerah

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinkominfo Kota Surabaya terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel komparasi sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya seperti pada tabel II.3

Tabel II.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kemenkominfo

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Diskominfo	Sasaran pada Renstra Diskominfo Provinsi	Sasaran pada Renstra Kemenkominfo
1	Persentase jumlah keluhan yang selesai ditindaklanjuti	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Diseminasi informasi dan Keterbukaan Informasi Publik	1. E-government 2. Keterbukaan informasi publik
2	Jumlah kunjungan rata-rata per bulan pada website www.surabaya.go.id	Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		



No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Diskominfo	Sasaran pada Renstra Diskominfo Provinsi	Sasaran pada Renstra Kemenkominfo
3	Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	
4	Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK			

II.4.1 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya

Gambaran hubungan RTRW dengan fungsi pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel II.4



Tabel II.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

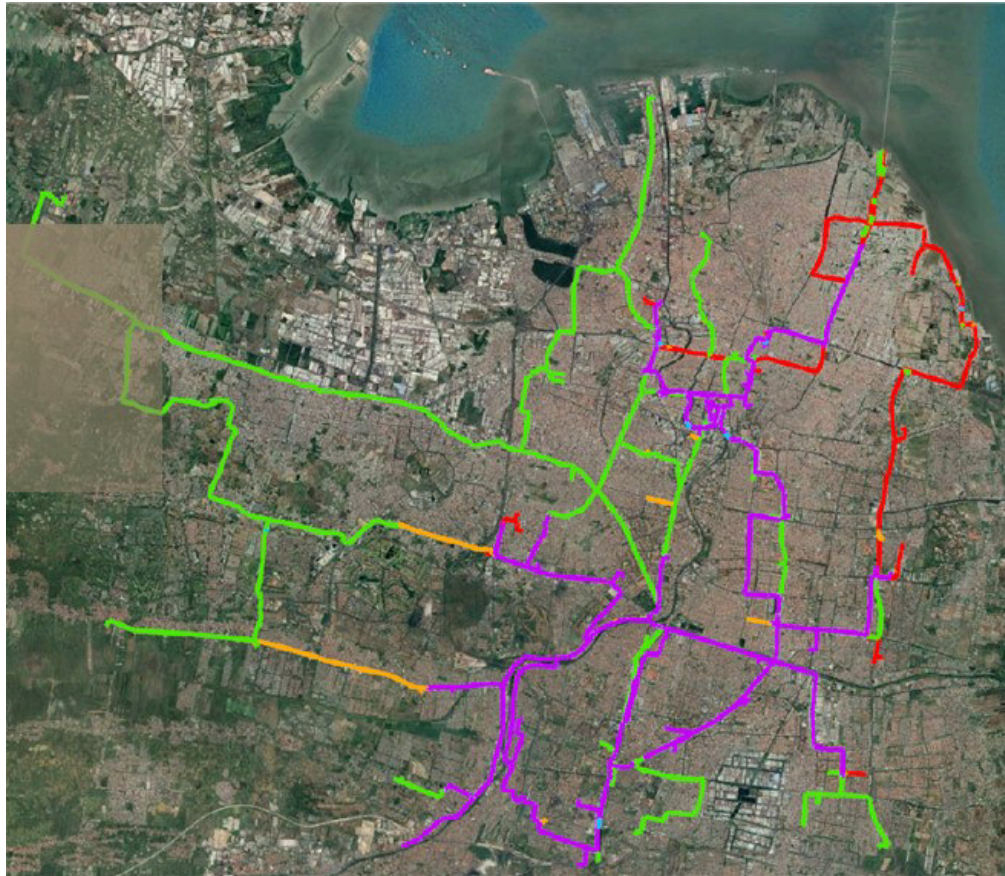
No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	Pengembangan Jaringan Kabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan pelayanan jaringan telepon kabel	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), dan telekomunikasi	Kota Surabaya
2	Pengembangan jaringan nirkabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan penggunaan menara telekomunikasi bersama	Penunjang Penyelenggaraan Layanan TIK	Kota Surabaya
			Pengawasan dan pengaturan pembangunan BTS	Penunjang Penyelenggaraan Layanan TIK	Kota Surabaya
3	Pengembangan sistem telekomunikasi untuk publik	Telah ada sistem komunikasi publik, namun tingkat partisipasi masyarakat belum optimal	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi Telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kota Surabaya

Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah membangun jaringan *Fiber Optic (FO)* yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Total jaringan FO yang sudah terbangun sampai dengan tahun 2021 sepanjang 237.135,95 meter. Total lokasi yang telah terhubung dengan jaringan FO ini adalah sebanyak 208 lokasi. Persebaran jaringan FO dapat dilihat pada Gambar II.4.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah memasang CCTV di berbagai titik di wilayah Kota Surabaya. Total yang sudah terpasang sampai dengan tahun 2021 ada 1050 titik dengan rincian CCTV *Face Recognition* sebanyak 175 titik, CCTV Keamanan Jalan sebanyak 163 titik, CCTV Keamanan Bangunan sebanyak 675 titik, dan CCTV Keamanan Ruang Terbuka sebanyak 37 titik.



Gambar II.4
Jaringan Fiber Optic Kota Surabaya



II.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah

Program kota yang diturunkan menjadi program Organisasi Perangkat Daerah dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi dan aktivitas pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel II.5



Tabel II.5
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Surabaya
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	-	-
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	-	-
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Dinkominfo memiliki kewajiban untuk turut serta melakukan monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Selama ini pengawasan dan monitoring telah dilaksanakan, namun masih terkendala dalam kewenangan
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	-	-
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	-	-
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	-	-	-



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan Sasaran dan Program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, serta penunjang Urusan dimana ketiga Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tersebut diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Serta Statistik, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta statistik; Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keamanan dan infrastruktur teknologi; Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), yang bertanggung jawab dalam mengelola aplikasi, memberikan layanan teknologi informasi, serta menjalankan tata kelola dan evaluasi layanan pemerintah berbasis e-Gov. Sedangkan penunjang urusan diampu oleh Sekretariat.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Urusan maupun Bidang yang diampu adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
 - Belum optimalnya implementasi literasi digital
 - Belum optimalnya manajemen isu pemerintah



- Tidak semua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - Adanya permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan segera
2. Penyelenggaraan statistik sektoral
 - Belum terwujudnya satu data yang terintegrasi
 - Data masih tersebar di masing-masing lembaga produsen data
 - Belum adanya satu sistem yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat digunakan oleh lembaga produsen data untuk mengentrikan/mengupdate data
 3. Pengelolaan aplikasi informatika
 - Belum diterapkannya tanda tangan digital yang tersertifikasi
 - Belum adanya sistem penghubung layanan
 - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pusat data
 - Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi standard nasional
 - Belum tersedianya beberapa dokumen penunjang terkait aspek-aspek SPBE
 4. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - Belum optimalnya penerapan manajemen keamanan informasi
 5. Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - Pelayanan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran terkendala karena anggaran difokuskan untuk pengendalian COVID-19



III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Walikota Surabaya mempunyai visi:

“GOTONG ROYONG MENUJU SURABAYA KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN”

Makna dalam visi tersebut adalah:

➤ GOTONG ROYONG

Nilai Gotong Royong merupakan nilai luhur yang tumbuh di kawasan desa di Jawa khususnya wilayah Jawa Timur. Gotong royong merupakan pengarah tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menja lankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung Program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.



➤ **MAJU**

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upayapencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Upaya pembangunan ekonomi Kota Surabaya kedepan harus berbasis kepada sektor potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis kepada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampumeningkatkankesejahteraan masyarakat.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung ekonomi antar wilayah di Jawa Timur maupun di Nasional kebutuhan infrastruktur pendukung perdagangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Surabaya.



➤ **HUMANIS**

Implementasi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur pembangunan kualitas manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

➤ **KOTA DUNIA BERKELANJUTAN**

Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) yaitu bagaimana pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya



mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Kota Surabaya akan menjadi kota yang sehat, indah, nyaman serta aman dengan memenuhi infrastruktur yang berkualitas dan merata yang mendukung warganya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat ekonomi serta mendukung kelancaran mobilitas warga serta bebas macet. Kota Surabaya harus mendukung dampak ekologi yang muncul dari aktivitas kota salah satunya dengan membangun tata kelola sampah dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Selain itu mengembangkan Kota Surabaya sebagai kota digital, membangun fasilitas dan ruang olahraga, ruang seni, dan ruang ekspresi bagi warganya. Serta dapat terhubungnya tatanan landscape kota yang dapat mendukung konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Surabaya secara berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021-2026 harus mendukung tercapainya visi “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional



2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi yang ke-4 yakni Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel III.2

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4: Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Implementasi literasi Digital • Belum Optimalnya Manajemen Isu Pemerintah • Tidak semua KIM aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya layanan penyelenggaraan bidang komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian • Terbatasnya sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian dan komitmen pimpinan terhadap urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian • Tersedianya Perpres Nomor 39



Visi: GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif</p> <p>Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan segera • Belum terwujudnya satu data yang terintegrasi • Belum adanya Bidang yang mampu urusan statistik • Data masih tersebar di masing-masing lembaga produsen data • Belum adanya satu sistem yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat digunakan oleh lembaga produsen data untuk mengentrikan/ mengupdate data • Belum diterapkannya tanda tangan digital yang tersertifikasi • Belum adanya sistem penghubung layanan • Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pusat data • Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) 	<ul style="list-style-type: none"> • manusia yang kompeten di Belum optimalnya layanan penyelenggaraan telekomunikasi, Statistik dan Persandian • Belum adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan lembaga yang melakukan sertifikasi tanda tangan digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia • Adanya Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah • Tersedianya berbagai saluran komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya • Kebutuhan untuk optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Bernbasis Elektronik • Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik • Permenpan RB 59/2020



Visi: GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi standard nasional</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum tersedianya beberapa dokumen penunjang terkait aspek-aspek SPBE• Belum optimalnya penerapan manajemen keamanan informasi• Pelayanan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran terkendala karena anggaran difokuskan untuk pengendalian COVID-19		



III.3 Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga(K/L) dan Renstra OPD Provinsi

III.3.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, yakni melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan:

- Pembangunan dan pengembangan sistem informasi
- Pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer antar bidang
- Pengelolaan produksi informasi dan publikasi
- Pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik.



III.3.2 Telaahan Lembaga Sandi Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di seksi keamanan dan persandian;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di seksi keamanan dan persandian;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
4. Merumuskan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
5. Merumuskan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan perangkat daerah;
6. Merencanakan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
7. Merencanakan kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
8. Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota
9. Merencanakan kebutuhan SDM Sandi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
10. Melaksanakan monitoring trafik elektronik;
11. Melaksanakan penanganan insiden keamanan informasi;



12. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di keamanan dan persandian;
13. Melaksanakan pengujian keamanan domain dan sub domain;
14. Melaksanakan pemantauan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
15. Melaksanakan audit TIK;
16. Melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif, dan produktif;
17. Melaksanakan filtering konten negatif (jaringan pemerintah daerah);
18. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
19. Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
20. Melayani pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
21. Menyelenggarakan program-program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
23. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
24. Mengamankan kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
25. Melaksanakan Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;



26. Melaksanakan pencadangan, pemulihan data, informasi dan sistem jika terjadi gangguan operasional keamanan dan persandian;
27. Melayani penyusunan instrumen & pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
28. Melayani pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Daerah;
29. Melaksanaakan pengawasan dan pengendalian di seksi keamanan informasi dan persandian;
30. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
31. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.3.3 Badan Pusat Statistik (BPS)

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020-2024, maka visi dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” (“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”). Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga,



semakin menguatkan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik.

Misi Badan Pusat Statistik (BPS) dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Visi dan misi Badan Pusat Statistik (BPS) sejalan dengan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
2. Menyiapkan bahan pemantauan komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintahan daerah;
3. Menyiapkan bahan untuk mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di daerah;
4. Menyiapkan bahan untuk mengumpulkan dan mengelola data statistik sektoral di lingkup kota;
5. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Menyiapkan bahan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;



7. Menyiapkan bahan pelayanan dan mengolah pengaduan masyarakat;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2025, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya

Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah membangun jaringan Fiber Optic (FO). yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Total jaringan FO yang sudah terbangun sampai dengan tahun 2021 sepanjang 237.135,95 meter. Total lokasi yang telah terhubung dengan jaringan FO ini adalah sebanyak 208 lokasi.



Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah memasang CCTV di berbagai titik di wilayah Kota Surabaya. Total yang sudah terpasang sampai dengan tahun 2021 ada 1050 titik dengan rincian CCTV Face Recognition sebanyak 175 titik, CCTV Keamanan Jalan sebanyak 163 titik, CCTV Keamanan Bangunan sebanyak 675 titik, dan CCTV Keamanan Ruang Terbuka sebanyak 37 titik.

III.4.2 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peranan dalam mengembangkan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kewajiban untuk turut serta melakukan monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisa faktor pendorong dan penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika, ditentukan isu-isu strategis melalui *scoring* terhadap kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil *scoring* didapatkan isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi satu data

Ketersediaan data dan informasi sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan. Namun sayangnya data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah. Data yang tersimpan di masing-masing Perangkat Daerah ini sering menyebabkan terjadi duplikasi data. Bahkan data tertentu dimiliki atau dikelola oleh lebih dari dari 1 (satu) Perangkat Daerah sehingga menyulitkan untuk mengetahui data mana yg lebih tepat dan akurat.



Seyogyanya semua Perangkat Daerah harus sepakat terkait dengan format dan metadata suatu data. Karena dengan beragamnya format dan meta data di masing-masing perangkat daerah akan menyulitkan untuk mengintegrasikan menjadi satu data. Sehingga penting sekali keberadaan regulasi yang mengatur terkait dengan implementasi satu data.

2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pusat data

Pusat data merupakan fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan layanan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk layanan. Pusat data juga memiliki infrastruktur, konektivitas, pengelolaan, manajemen dan alokasi sumber daya untuk keperluan ketersediaan layanan jangka panjang, kehandalan dan keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi.

Pusat data yang menjadi sentral layanan teknologi informasi dan komunikasi menjadi aset vital bagi terselenggaranya layanan, baik berjalannya sebuah layanan sistem informasi, dan akses dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pusat data menjadi strategis karena menunjukkan eksistensi aset yang sangat berharga yaitu data dan informasi. Dalam perspektif nasional, sebuah negara, instansi pemerintah, organisasi bisnis pasti berusaha untuk menjaga kepentingan, dan aset pentingnya tersebut sehingga keberadaan pusat data menjadi penting.

3. Belum optimalnya penerapan manajemen keamanan informasi

Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Penyelenggara pelayanan publik terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal dan aman. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman Keamanan



Informasi, yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Peran sumber daya informasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami masalah berupa gangguan dan ancaman yang menyangkut aspek kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*). Adanya ancaman terhadap sumber daya informasi tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengamanan data dan informasi.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang. Visi dan misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti visi misi Kota Surabaya tahun 2021-2026.

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkelanjutan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 (satu) tujuan saja yaitu *meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah* dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam tujuan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menetapkan 5 (lima) sasaran, yakni :

1. Sasaran 1 : Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota.
2. Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Sasaran 3 : Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota.
4. Sasaran 4 : Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik
5. Sasaran 5 : Meningkatnya nilai target indikator SPBE



Untuk lebih jelasnya perumusan tujuan, sasaran, dan Indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel T.C-25 :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Surabaya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,1 (Baik)	3,2 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)
1.1	Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,55	89,56	89,57	89,58	89,59
1.3	Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik	Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	42 %	48 %	54 %	60 %	66 %
1.5	Meningkatnya nilai target indikator SPBE	Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	38 %	50 %	69 %	88 %	100 %



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada Rancangan RPJMD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 - 2026. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya Arah Kebijakan.

Untuk mewujudkan 1 (satu) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan misi ke-4 (empat) RPJMD “Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”, maka ditetapkan 5 (lima) strategi untuk masing-masing Sasaran, sebagai berikut:

1. Mengelola komunikasi publik yang efektif melalui penyediaan dan distribusi informasi sesuai kode etik
2. Menyediakan sistem informasi data skala kota
3. Menyiapkan kebijakan SPBE, petunjuk teknis tata kelola SPBE dan manajemen SPBE
4. Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya



Dari 5 (lima) strategi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) Arah Kebijakan sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi secara akurat
2. Meningkatkan strategi komunikasi skala kota
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengumpulan dan pemanfaatan data dengan PD dan instansi terkait
4. Menyediakan informasi data statistik skala kota kepada masyarakat secara terbuka
5. Menjalankan SPBE sebagai panduan dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. Melaksanakan *cyber patrol* secara berkala
7. Mengoptimalkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

Gambaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan adalah sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.26 berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan			
Misi (4): Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik	Mengelola komunikasi publik yang efektif melalui penyediaan dan distribusi informasi sesuai kode etik	Menyajikan informasi secara akurat
			Meningkatkan strategi komunikasi skala kota
	Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota	Menyediakan sistem informasi data skala kota	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengumpulan dan pemanfaatan data dengan PD dan instansi terkait
			Menyediakan informasi data statistik skala kota kepada masyarakat secara terbuka



Visi: Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan			
Misi (4): Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya nilai target indikator SPBE	Menyiapkan kebijakan SPBE, petunjuk teknis tata kelola SPBE dan manajemen SPBE	Menjalankan SPBE sebagai panduan dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota	Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Melaksanakan cyber patrol secara berkala
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kominfo Kota Surabaya	Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kota Surabaya



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, maka langkah strategis yang dilakukan adalah menuangkan kebijakan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Program merupakan arah kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Dalam rencana strategis, kegiatan dan sub kegiatan memiliki kedudukan pada ujung pelaksanaan aktifitas yang menjadi aspek operasional, yang mengarah kepada pemenuhan sasaran dan tujuan organisasi.

Dalam rencana strategis ini, masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diberikan indikator sebagai ukuran keberhasilan. Indikator memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan suatu program dan sub kegiatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari program dan sub kegiatan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026, terdapat 5 program, 9 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, memiliki kegiatan:
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memiliki sub kegiatan:
 - i. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah



- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memiliki sub kegiatan:
 - i. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - iii. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - iv. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, memiliki kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memiliki sub kegiatan:
 - i. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, memiliki sub kegiatan:
 - i. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki kegiatan:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memiliki sub kegiatan:
 - i. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - ii. Pelayanan Informasi Publik
 - iii. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, memiliki kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, memiliki sub kegiatan:
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral



5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kegiatan:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan:
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan:
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki sub kegiatan:
 - i. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Selain melaksanakan 5 program diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan kegiatan sesuai mandat yang diberikan oleh pimpinan. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel T-C.27.



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

VI-4

**Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Surabaya**

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0 (Baik)	3,1 (Baik)	Rp 107.055.290.982	3,2 (Baik)	Rp 106.171.622.802	3,3 (Baik)	Rp 108.648.376.824	3,4 (Baik)	Rp 114.344.155.284	3,5 (Sangat Baik)	Rp 117.155.909.705	3,5 (Sangat Baik)	Rp 117.155.909.705	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota			Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100 %	100 %	Rp 577.989.836	100 %	Rp 605.072.277	100 %	Rp 604.243.387	100 %	Rp 663.636.328	100 %	Rp 695.275.338	100 %	Rp 695.275.338	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100 %	100 %	Rp 577.989.836	100 %	Rp 605.072.277	100 %	Rp 604.243.387	100 %	Rp 663.636.328	100 %	Rp 695.275.338	100 %	Rp 695.275.338	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	5 Sektor	Rp 577.989.836	5 Sektor	Rp 605.072.277	5 Sektor	Rp 604.243.387	5 Sektor	Rp 663.636.328	5 Sektor	Rp 695.275.338	5 Sektor	Rp 695.275.338	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	Dokumen	Rp 577.989.836	12 Dokumen	Rp 605.072.277	12 Dokumen	Rp 604.243.387	12 Dokumen	Rp 663.636.328	12 Dokumen	Rp 695.275.338	12 Dokumen	Rp 695.275.338	Dinas Komunikasi dan Informatika	



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

VI-5

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika			Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	89,54	89,55	Rp 16.031.118.054	89,56	Rp 16.474.762.156	89,57	Rp 17.112.886.144	89,58	Rp 17.978.012.542	89,59	Rp 18.550.500.695	89,59	Rp 18.550.500.695	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89,54 %	89,54 %	Rp 16.031.118.054	89,55 %	Rp 16.474.762.156	89,56 %	Rp 17.112.886.144	89,57 %	Rp 17.978.012.542	89,58 %	Rp 18.550.500.695	89,58 %	Rp 18.550.500.695	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Rp 13.888.405.259	100 %	Rp 14.235.615.390	100 %	Rp 14.591.505.775	100 %	Rp 14.956.293.420	100 %	Rp 15.330.200.755	100 %	Rp 15.330.200.755	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Orang/bulan	Rp 13.888.405.259	37 Orang/bulan	Rp 14.235.615.390	37 Orang/bulan	Rp 14.591.505.775	37 Orang/bulan	Rp 14.956.293.420	37 Orang/bulan	Rp 15.330.200.755	37 Orang/bulan	Rp 15.330.200.755	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	100 %	Rp 1.636.705.885	100 %	Rp 1.547.288.522	100 %	Rp 1.728.487.950	100 %	Rp 1.890.828.128	100 %	Rp 1.996.579.388	100 %	Rp 1.996.579.388	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	Paket	Rp 1.636.705.885	4 Paket	Rp 1.547.288.522	4 Paket	Rp 1.728.487.950	4 Paket	Rp 1.890.828.128	4 Paket	Rp 1.996.579.388	4 Paket	Rp 1.996.579.388	Dinas Komunikasi dan Informatika	



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

VI-6

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Kantor	Kantor yang Disediakan														Informatika	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	100 %	Rp 506.006.910	100 %	Rp 691.858.244	100 %	Rp 792.892.419	100 %	Rp 1.130.890.994	100 %	Rp 1.223.720.552	100 %	Rp 1.223.720.552	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	Unit	Rp 506.006.910	90 Unit	Rp 691.858.244	90 Unit	Rp 792.892.419	90 Unit	Rp 1.130.890.994	90 Unit	Rp 1.223.720.552	90 Unit	Rp 1.223.720.552	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatkan pengamanan data dan informasi skala kota			Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100 %	100 %	Rp 6.306.046.465	100 %	Rp 6.491.621.977	100 %	Rp 6.563.959.430	100 %	Rp 6.940.181.827	100 %	Rp 7.177.846.408	100 %	Rp 7.177.846.408	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	N/A	8 %	Rp 6.306.046.465	18 %	Rp 6.491.621.977	27 %	Rp 6.563.959.430	34 %	Rp 6.940.181.827	41 %	Rp 7.177.846.408	41 %	Rp 7.177.846.408	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi	0 kali/per hari	3 kali/per hari	Rp 3.940.962.821	3 kali/per hari	Rp 4.046.679.835	3 kali/per hari	Rp 4.094.204.516	3 kali/per hari	Rp 4.326.138.676	3 kali/per hari	Rp 4.474.290.865	3 kali/per hari	Rp 4.474.290.865	Dinas Komunikasi dan Informatika	



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

VI-7

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Daerah Kabupaten/Kota	dan Informatika															
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	13 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Rp 3.940.962.821	13 Perangkat Daerah	Rp 4.046.679.835	13 Perangkat Daerah	Rp 4.094.204.516	13 Perangkat Daerah	Rp 4.326.138.676	13 Perangkat Daerah	Rp 4.474.290.865	13 Perangkat Daerah	Rp 4.474.290.865	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	0 Kali	6 Kali	Rp 2.365.083.644	6 Kali	Rp 2.444.942.142	6 Kali	Rp 2.469.754.914	6 Kali	Rp 2.614.043.151	6 Kali	Rp 2.703.555.543	6 Kali	Rp 2.703.555.543	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	58 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Rp 2.365.083.644	58 Perangkat Daerah	Rp 2.444.942.142	58 Perangkat Daerah	Rp 2.469.754.914	58 Perangkat Daerah	Rp 2.614.043.151	58 Perangkat Daerah	Rp 2.703.555.543	58 Perangkat Daerah	Rp 2.703.555.543	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatkan pengelolaan komunikasi publik			Persentase Cakupan masyarakat yang terjangkau informasi publik	36 %	42 %	Rp 14.757.614.211	48 %	Rp 15.083.426.194	54 %	Rp 15.398.988.106	60 %	Rp 15.971.002.647	66 %	Rp 16.438.816.063	66 %	Rp 16.438.816.063	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Persentase kecepatan respon/tanggapan	83,6 %	85 %	Rp 14.757.614.211	86 %	Rp 15.083.426.194	87 %	Rp 15.398.988.106	88 %	Rp 15.971.002.647	89 %	Rp 16.438.816.063	89 %	Rp 16.438.816.063	Dinas Komunikasi dan Informatika	



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

VI-8

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		PUBLIK	pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam															
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	3 Jenis	4 Jenis	Rp 14.757.614.211	4 Jenis	Rp 15.083.426.194	4 Jenis	Rp 15.398.988.106	4 Jenis	Rp 15.971.002.647	4 Jenis	Rp 16.438.816.063	4 Jenis	Rp 16.438.816.063	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0 Dokumen	Dokumen	Rp 723.718.054	12 Dokumen	Rp 753.073.985	12 Dokumen	Rp 756.325.479	12 Dokumen	Rp 816.076.555	12 Dokumen	Rp 849.869.579	12 Dokumen	Rp 849.869.579	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	11 Dokumen	Dokumen	Rp 2.733.055.875	12 Dokumen	Rp 2.584.841.263	12 Dokumen	Rp 2.676.436.696	12 Dokumen	Rp 2.893.224.447	12 Dokumen	Rp 2.943.702.842	12 Dokumen	Rp 2.943.702.842	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	0 Dokumen	Dokumen	Rp 11.300.840.282	12 Dokumen	Rp 11.745.510.946	12 Dokumen	Rp 11.966.225.931	12 Dokumen	Rp 12.261.701.645	12 Dokumen	Rp 12.645.243.642	12 Dokumen	Rp 12.645.243.642	Dinas Komunikasi dan Informatika	



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

VI-9

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			Komunikasi Publik															
Meningkatnya nilai target indikator SPBE			Persentase peningkatan nilai target indikator SPBE	0 %	38 %	Rp 69.38 2.522.41 6	50 %	Rp 67.516.7 40.198	69 %	Rp 68.968. 299.757	88 %	Rp 72.791 .321.940	100 %	Rp 74.293. 471.201	100 %	Rp 74.293 .471.201	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	N/A	100 %	Rp 69.38 2.522.41 6	100 %	Rp 67.516.7 40.198	100 %	Rp 68.968. 299.757	100 %	Rp 72.791 .321.940	100 %	Rp 74.293. 471.201	100 %	Rp 74.293 .471.201	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO ≤ 1 x 24 jam b. Jaringan FO ≤ 3 x 24 jam	0 %	100 %	Rp 31.18 9.643.65 6	100 %	Rp 28.232.6 21.598	100 %	Rp 28.962. 078.222	100 %	Rp 30.735 .177.424	100 %	Rp 31.347. 121.528	100 %	Rp 31.347 .121.528	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	204 Unit	Unit	Rp 31.18 9.643.65 6	267 Unit	Rp 28.232.6 21.598	322 Unit	Rp 28.962. 078.222	381 Unit	Rp 30.735 .177.424	415 Unit	Rp 31.347. 121.528	415 Unit	Rp 31.347 .121.528	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait	0 %	100 %	Rp 38.19 2.878.76 0	100 %	Rp 39.284.1 18.600	100 %	Rp 40.006. 221.535	100 %	Rp 42.056 .144.516	100 %	Rp 42.946. 349.673	100 %	Rp 42.946 .349.673	Dinas Komunikasi dan Informatika	



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

VI-
10

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			aplikasi ≤ 1 x 24 jam															
			Persentase pengelolaan pusat data yang dipelihara dan dimonitoring	0 %	2 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72 Dokumen	Dokumen Rp 397.427.560	58 Dokumen	Rp 418.720.669	58 Dokumen	Rp 422.194.185	58 Dokumen	Rp 523.770.903	58 Dokumen	Rp 498.811.081	58 Dokumen	Rp 498.811.081		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	Unit Rp 4.972.386.086	2 Unit	Rp 5.131.020.027	2 Unit	Rp 5.245.325.652	2 Unit	Rp 5.465.223.740	2 Unit	Rp 5.641.236.233	2 Unit	Rp 5.641.236.233		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	0 Dokumen	Dokumen Rp 28.454.220.881	58 Dokumen	Rp 29.206.388.925	58 Dokumen	Rp 28.496.496.369	58 Dokumen	Rp 29.865.898.587	58 Dokumen	Rp 31.760.170.474	58 Dokumen	Rp 31.760.170.474		Dinas Komunikasi dan Informatika	



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2021-2026**

VI-11

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Daerah															
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	180 Unit	Unit	Rp 4.368.844.233	190 Unit	Rp 4.527.988.979	190 Unit	Rp 5.842.205.329	190 Unit	Rp 6.201.251.286	190 Unit	Rp 5.046.131.885	190 Unit	Rp 5.046.131.885	Dinas Komunikasi dan Informatika	



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2021-2026 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Perubahan Renstra dilakukan dikarenakan terdapat perubahan Peraturan Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra perubahan tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan informatika. Rancangan renstra perubahan tahun 2021-2026 sebagai rumusan perencanaan membutuhkan komitmen dari seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah disusun. Tanpa adanya komitmen tersebut Renstra perubahan tahun 2021-2026 hanyalah sebuah dokumen perencanaan yang tidak akan mampu berbuat apapun.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra perubahan tahun 2021-2026 harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama yang didukung dengan kolaborasi dari seluruh komponen dalam organisasi. Sehingga dibutuhkan manajemen yang baik untuk mewujudkan kolaborasi yang harmonis dan produktif antar komponen dalam organisasi.

Semoga Renstra perubahan tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Kota Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.

Surabaya, 26 Mei 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Surabaya



Muhamad Fikser, AP, MM
Pembina Utama Muda
197405091994121001